

KONSEP NEGARA DAN POLITIK ISLAM (Studi Pemikiran Abu A'la al-Maududi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Aqidah Filsafat



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2009 AF 015	No. REG : U-2009/AF/015 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

BAKRIN

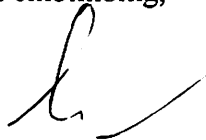
NIM : E01302038

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Bakrin ini telah
diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 26 Juli 2009
Pembimbing,



Dr. BIYANTO M. Ag
NIP.197210101996031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Bakrin ini telah
dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya,.....

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Drs. Ma'shum, M.Ag
NIP. 1960091419890311001

Tim Penguji:

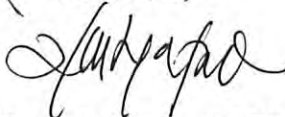
Ketua,



Dr. Biyanto, M.Ag

NIP. 197210101996031001

Sekretaris,



Dr. Hammis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

Penguji I,



Drs. Loekisno CW, M.Ag

NIP. 196303271993031004

Penguji II,



Drs. Arifin Ridwan

NIP. 195310091983031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **KONSEP NEGARA DAN POLITIK ISLAM** (Studi Pemikiran Abu A'la al-Maududi). Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang pemikiran Abu A'la al-Maududi dalam kontek negara dan politik Islam serta signifikansi pemikirannya.

Metode yang digunakan dalam sikripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati.

Adapun hasil dari penelitian ini penulis membuat lima bab yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang mana bab satu dengan bab yang lainnya adalah saling berkaitan. Sehingga hasil penelitian ini dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini.

Negara yang dimaksud Abu A'la al-Maududi adalah negara yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Yang mana dalam konsep negara ini, Abu A'la al-Maududi menyebutnya dengan istilah *Teo Demokrasi*.

Sedangkan konsep politik Islam yang dibawa oleh Abu A'la al-Maududi adalah Ke-Esaan Tuhan dan iman terhadap kekuasaan Allah. Berpegang pada misi para Nabi yang memperkokoh kerajaan Allah diatas bumi ini serta menyebarkan sistem kehidupan yang diamanatkan oleh Allah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Dalam.....	i
Persetujuan Pembimbing Skripsi	ii
Pengesahan Tim Penguji Skripsi	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	v
Persembahan	vi
Daftar Isi	vii
Motto.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Sumber-Sumber yang digunakan.....	10
1. Sumber Primer	11
2. Sumber Skunder.....	12
F. Metode dan Sistematika Pembahasan.....	14
1. Metode Pembahasan	14
2. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN DAN KARYA.....	 17
A. Kehidupan.....	17
B. Pendidikan.....	20
C. Aktifitas Sosial Politik.....	21
D. Karya-karya Abu A’la al-Maududi.....	28

pemikir politik Islam yang menyajikan konsepsi kenegaraan yang paling lengkap dan rinci dari sekian banyak pemikir Islam.⁷

Abu A'la al-Maududi bermaksud untuk membina kembali kehidupan manusia secara utuh dan membawa kepada berdirinya suatu masyarakat dan negara baru, kepada penegakan orde baru, suatu orde yang dalam bentuk idealnya disebutkan oleh Abu A'la al-Maududi sebagai *Khilafah 'ala Manhaj Al-Nubuwwah* (kekhilafahan atas pola kenabian).⁹

Abu A'la al-Maududi memandang Islam sebagai Ideologi holistik, sebagaimana orang barat memandang ideologinya. Gagasan ideologi Islamnya sebagai salah satu artikulasi yang paling sistematis.

Abu A'la al-Maududi percaya bahwa negara Islam diperlukan. Menurut Abu A'la al-Maududi, kaum Muslimin akan menghendaki negara Islam kalau

[illegible]

Bahwasanya mayoritas warga negara Pakistan sangat yakin akan prinsip-prinsip Islam, dan bahwasanya semua perjuangan dan pengorbanan demi pergerakan kemerdekaan Pakistan ditujukan semata-mata untuk

menegakkan semurni-murninya prinsip-prinsip Islam disemua sektor kehidupan kita.¹³

Maka oleh sebab itu, setelah berdirinya Pakistan meminta agar Dewan konstituante mencanangkan; (1) Bahwa kedaulatan negara Pakistan berada ditangan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bahwa pemerintahan Pakistan hanya menjadi satu agen untuk melaksanakan kehendak yang berdaulat. (2) Bahwa syari'ah Islam harus membentuk norma dasar dan sumber hukum yang tidak dapat diganggu gugat oleh perundang-undangan yang ada dibawahnya. (3) Bahwa semua perundang-undangan yang ada atau yang akan dibentuk, baik dalam materi ataupun semangatnya harus berjalan dan bersumber syari'ah sebagai sumber dari segala sumber hukum. (4) Bahwa kekuasaan pemerintah Pakistan harus bersumber dari hukum dan dibatasi oleh hukum, serta dilaksanakan hanya didalam batas-batas syari'ah.

Karena tuntutan ini mencerminkan aspirasi rakyat yang sangat dalam, dan mencerminkan kehendak mereka secara umum, gaungnya segera bergema kesetiap sudut negara ini, dan tuntutan agar empat tuntutan rakyat ini diterima dan segera menyebar laksana jilatan api.¹⁴

Dalam situasi dan kondisi semacam inilah muncul tuntutan untuk membuat kajian mengenai teori politik Islam dengan cara yang ilmiah dan

¹³ Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, 48

¹⁴ *Ibid.* 48

bertujuan untuk mengahayati makna, hakikat, tujuan dan manfaatnya yang sebenarnya. Kajian sistematis ini mudah-mudahan dapat membantu banyak untuk mengahiri kesimpang siuran pemikiran ini serta membungkam orang-orang yang secara membabi buta mencanangkan bahwa tidak ada satupun yang dapat disebut sebagai teori politik Islam. Saya harap kajian ini juga akan memberikan pelita yang mampu menerangi dunia.¹⁵

a. Abu A'la al-Maududi, Menjadi Islam Sejati

Dalam buku ini menjelaskan, bahwa ide pokoknya adalah menganjurkan kepada umat manusia untuk menjadi Muslim secara total. Baik identitas yang ada pada KTP, perbuatan sehari-hari, lebih-lebih iman yang tertanam dalam hatinya.

b. Abu A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*

Dalam buku ini merupakan himpunan karya dan pidato Abu A'la al-Maududi yang membahas politik dan konstitusi Islam. Isi dari buku ini adalah menjelaskan tentang hukum Islam, legislasi dan ijtihad dalam Islam, pemikiran politik dan konstitusi Islam, konsep politik al-Qur'an, perinsip-prinsip negara Islam, landasan konstitusi Islam menurut al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan yang menarik untuk dikaji dalam buku ini adalah tentang pemikiran politik dan konstitusi Islam, yang didalamnya membahas tentang dasar-dasar Islam, misi para Nabi, prinsip pertama teori politik Islam, hakikat dan karakteristik negara Islam, tujuan negara Islam dan teori kekhalifahan serta hakikat demokrasi dalam Islam.

c. **Khilafah dan Kerajaan, Abu A'la al-Maududi**

Dalam buku ini, Abu A'la al-Maududi menjelaskan tentang asas-asas penting dalam Islam. *Pertama*, adalah Tauhid, yang mana seluruh

Nabi dan Rasul mempunyai tugas penting untuk mengajarkan tauhid kepada seluruh umat manusia. *Kedua*, adalah teori politik Islam, dimana dalam teori politik Islam ini rakyat tidak menggunakan kedaulatannya atas kemauannya sendiri karena ada peraturan Tuhan, norma dan nilai Ilahi yang harus ditaati. Norma-norma dan nilai-nilai Ilahi tersebut harus menjadi paradigma program sosial, politik dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat para wakilnya. Dalam hal ini Abu A'la al-Maududi mengistilahkan dengan *Theo Democracy* untuk pemerintahan Islam. Bahwa Islam adalah memberikan kedaulatan kepada rakyat, tetapi kedaulatan tersebut tidak mutlak untuk manusia karena dibatasi oleh norma-norma dan nilai-nilai yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan yang diinginkan oleh rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan.

2. *Sumber Skunder*

a. Alam pikiran Islam Modern di India dan Pakistan

Didalam buku ini menjelaskan tentang proses perkembangan pemikiran Muslim di India dan Pakistan. Dimulai sejak Sir Sayyid Akhmad Khan hingga Abu A'la al-Maududi. Adapun yang ditulis dari pemikir-pemikir tersebut adalah membahas tentang biografi dan

pemikirannya, terutama tentang Islam, tujuan dan strategi kebangkitan Islam.

b. Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam

Dalam buku ini berisi tentang pokok bahasan sejarah perkembangan, gerakan pemikiran modern di Mesir (al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha), Turki (Tanzimat, gerakan Utsmani Muda dan Gerakan Turki Muda), India (Akhmad Khan dan Amir Ali) dan di Pakistan (Iqbal, Ali Jinnah dan Abu A'la al-Maududi).

c. Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran

Dalam buku ini menjelaskan tentang hubungan antara Islam dan Politik. Dimana yang dimaksud dengan system politik disini adalah; suatu konsepsi yang berisikan tentang ketentuan siapa sumber kekuasaan negara dan siapa pelaksana tersebut? Apa dasar-dasarnya dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan? Dan kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Didalam buku ini juga membahas tentang;

Untuk penggalian data, penulis menggunakan library research (studi kepustakaan) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

2. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami karya ilmiah ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang mana bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga senakin jelaslah hasil penelitian tersebut. Sistematika yang akan digunakan adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan. Yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Sumber-Sumber yang Digunakan, Metode Pembahasan dan Sistematika Pembahasan

Bab II Latar Belakang Pemikiran dan Karya Abu A'la al-Maududi.
Yang terdiri dari; Kehidupan, Pendidikan, Aktifitas Sosial Politik dan Karya-karyanya.

Bab III Pemikiran Abu A'la al-Maududi tentang negara dan Teori Politik Islam. Yang terdiri dari Pemikiran Abu A'la al-Maududi tentang negara Islam dan Teori Politik Islam Abu A'la al-Maududi

Bab IV Signifikansi pemikiran Abu A'la al-Maududi. Yang terdiri dari; Implikasi pemikiran Abu A'la al-Maududi dan praktek kenegaraan

Bab V Penutup

Bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

A. Kehidupan

Semasa kecilnya Abu A'la al-Maududi belajar dirumahnya dan di ajari oleh ayahnya sendiri. Ayahnya seorang pengikut sufi yang meninggalkan

² Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada) 179

profesinya sebagai pengacara, karena didalam menjalankan prakteknya ayah Abu A'la al-Maududi acap kali melakukan hal-hal yang bertentangan sebagai Muslim yang hendak memegang teguh kemurnian moral dan ahklak Islami dan juga disebabkan karena ayah Abu A'la al-Maududi muak terhadap pola hidup para rekan seprofesinya yang kebarat-baratan dan tidak Islami. Pernah pada suatu waktu berkat bujukan seorang pamannya, ayah Abu A'la al-Maududi mencoba membuka kantor pengacara sendiri, tetapi karena terlampau selektif dan menolak memutihkan yang hitam dan menghitam yang putih, maka ayah Abu A'la al-Maududi ditinggalkan oleh pelanggannya. Dengan demikian ayah Abu A'la al-Maududi mempunyai waktu yang cukup untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya termasuk Abu A'la al-Maududi. Baru setelah mencapai umur 11 tahun Abu A'la al-Maududi mengikuti ujian masuk ke sekolah lanjutan, dan menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan mendapatkan ijazah Maulawi. Sayang Abu A'la al-Maududi kurang beruntung, keadaan perekonomian dan juga kesehatan ayahnya pada waktu itu makin terpuruk, dan terpaksa meninggalkan Aurangabad dan pindah menumpang hidup bersama saudara tertuanya di Hyderabad.³ Namun demikian hal tersebut tidak mengganggu Abu A'la al-Maududi untuk meneruskan pendidikannya, sekalipun dilakukan diluar pendidikan reguler. Pada permulaan tahun 1920 Abu A'la al-Maududi telah menguasai bahasa Arab, Parsi, dan Inggris disamping bahasa ibunya Urdu, untuk

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI-PRESS, 1990) 158-159

Setelah berhenti dari pendidikan formalnya, Abu A'la al-Maududi berbelok kepada jurnalis untuk mencari nafkah. Pada tahun 1918 Abu A'la al-Maududi telah menulis artikel untuk surat kabar Urdu yang terkemuka, dan pada tahun 1920 tepatnya pada usia 17 tahun, Abu A'la al-Maududi di angkat menjadi editor surat kabar Taj yang diterbitkan dari Jabalpure, suatu kota di propinsi yang sekarang ini dinamakan Madhya Pradesh India. Pada akhir 1920 Abu A'la al-Maududi datang ke Delhi dan pertama kalinya memegang surat kabar muslim.⁴ Dan pada tahun 1921 Abu A'la al-Maududi berkenalan dengan pemimpin *Jami'at-i Ulama'i Hind*, pada khususnya Maulana Mufti Kifayatullah dan Ahmad Said. Disinilah Abu A'la al-Maududi lebih mengetahui kesadaran politik Muslim.⁵

⁵ Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung : Mizan, 1996)

Sehingga pada tanggal 23 September 1979 Abu A'la al-Maududi meninggal dunia disalah satu rumah sakit New York, Amerika Serikat.⁶

B. Pendidikan

Abu A'la al-Maududi merupakan anak termuda dari tiga bersaudara. Abu A'la al-Maududi memperoleh pendidikan awal dari ayahnya sendiri dirumahnya. Baru setelah mencapai umur 11 tahun Abu A'la al-Maududi mengikuti ujian masuk ke sekolah lanjutan dan disekolah tersebut untuk pertama kalinya mendapatkan pelajaran ilmu kimia, ilmu kalam, katimatika dan sebagainya. Abu A'la al-Maududi dikenal sebagai anak yang cerdas dan menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan mendapatkan ijazah Maulawi.⁷ etelah berhenti dari pendidikan formalnya, Abu A'la al-Maududi berbelok kepada jurnalis untuk mencari nafkah. Pada tahun 1918 Abu A'la al-Maududi telah menulis artikel untuk surat kabar urdu yang terkemuka, dan pada tahun 1920 tepatnya usia Abu A'la Al-Maududi 17 tahun di angkat menjadi editor surat kabar Taj yang diterbitkan dari Jabalpore , suatu kota di propinsi yang sekarang ini dinamakan Madhya Pradesh India. Pada akhir 1920 Abu A'la al-Maududi datang ke delhi dan pertama kalinya memegang surat kabar muslim.⁸

Di Delhi, Abu A'la al-Maududi punya peluang untuk terus belajar dan menumbuhkan minat intelektualnya, misalnya belajar bahasa Inggris dan membaca

⁶ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.....*, 158

⁷ *Ibid.* 159

⁸ Ali, *Alam Pikiran Islam Modern.....*, 238-239

Pada tahun 1941 Abu A'la al-Maududi bersama tujuh puluh lima pengikutnya mendirikan suatu organisasi yang diberi nama *jami'ah Islamiyah*. Sebagaimana *al-Ikhwān al-Muslimīn* organisasi pada permulaannya lebih merupakan ideologi dari pada gerakan politik keanggotaan, organisasi ini terbatas pada orang-orang Islam yang saleh, yang keutuhan pemahaman Islamannya dan integritas agamanya tidak disangsikan lagi. Sedangkan titik berat program

Pada tahun 1941 Abu A'la al-Maududi bersama tujuh puluh lima pengikutnya mendirikan suatu organisasi yang diberi nama *jami'ah Islamiyah*. Sebagaimana *al-Ikhwān al-Muslimīn* organisasi pada permulaannya lebih merupakan ideologi dari pada gerakan politik keanggotaan, organisasi ini terbatas pada orang-orang Islam yang saleh, yang keutuhan pemahaman Islamannya dan integritas agamanya tidak disangsikan lagi. Sedangkan titik berat program

diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 1967, semua hakim menyatakan keinginannya untuk menyaksikan berlakunya hukum Islam di Pakistan.¹⁹

Pada tahun 1960, Abu A'la al-Maududi memberikan kuliah-kuliah tentang al-Qur'an dan Hadits selama beberapa tahun yang juga dimuat dalam koran dan jurnal. Dan pada tanggal 3 November 1959, Abu A'la al-Maududi meninggalkan Karachi. Pada tanggal 5 Februari, Abu A'la al-Maududi kembali ke Palestina dari kunjungannya ke Saudi, Yordania, Palestina, Suria dan Mesir melakukan tour dan riset akademis yang hasilnya dimuat dalam *Tafhimul Qur'an*.

Pada September 1961, Abu A'la al-Maududi menerbitkan edisi *Tarjumanul Qur'an* yang terkenal dengan titisannya "Mansab-i Risalat". Tepatnya pada tanggal 15 Desember 1961, Abu A'la al-Maududi berpidato tentang sosiologi dan politik pada makan malam Rotarry Club di Lahore. Juni 1962 Abu A'la al-Maududi berpidato di Rabithan Alam Islami tentang "Islam dan keadilan social". Dan Mei 1962, Abu A'la al-Maududi memperoleh penghargaan dari Rabithan Alam Islami atas peran yang dilakukan dalam agama dan sejak itu selalu menjadi anggota komite eksekutif organisasi tersebut.²⁰ Abu A'la al-Maududi juga menjadi anggota komite pendiri *Rabitah al-Islami* (makalah), dan dia juga menjadi anggota Akademi Riset tentang hukum Islam di Madinah.²¹

¹⁹ Rahman, *Upaya al-Maududi.....*, 19

²⁰ Maududi, *Menjadi Muslim Sejati*, terj. Ahmad Baidowi (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999)

²¹ Ali, *Alam Pikiran Islam.....*, 243

Pada tanggal 7 juni 1972, Abu A'la al-Maududi menyelesaikan karyanya yang ditulis selama 30 tahun dalam bahasa Urdu, *Tafhimul Qur'an*. Dan pada tahun 1975, Abu A'la al-Maududi menulis *Sirah Nabi* yang ditulis dalam 4 jilid, yang berisi tentang sejarah prestasi Nabi dalam latar belakang social dan intelektual masyarakat Arab. Pada Maret 1976, bukunya *Sirah Nabi* memperoleh penghargaan sebagai karya terbaik jenis Sirah dari Rabithan Alam Islami. Dan pada tahun 1977 Abu A'la al-Maududi kembali aktif dalam politik.²³ Sehingga

²³ Maududi, *Menjadi.....*, 415

pada tanggal 23 September 1979 Abu A'la al-Maududi meninggal dunia disalah satu rumah sakit Newyork, Amerika Serikat.²⁴

D. Karya-karya Abu A'la al-Maududi

1. The Islamic Law and Constitution. Dalam buku ini membahas aspek hukum Islam yang meliputi legislasi dan ijtihad dalam Islam, upaya-upaya konstruktif, penegakan hukum Islam dalam suatu Negara serta pemikiran politik dan konstitusi Islam. Buku ini diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Asep Hikmat, dalam "Hukum-hukum dan Konstitusi Sistem Pilotik Islam", diterbitkan oleh Mizan, Bandung 1990
2. Islamic Way of Life. Buku ini berupaya memperkenalkan Islam berbagai aspeknya. Buku ini diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Oesman Raliby, dalam "Pokok-pokok dalam Pandangan Hidup Muslim", diterbitkan Bulan Bintang, Jakarta 1987
3. Correspondence Between Mawlana Mawdoodi and Maryam Jamilah. Dalam buku ini berisi kumpulan surat Abu A'la al-Maududi kepada Maryam Jamilah (Margaret Marcus), Seorang muslimah mu'allaf yang berasal dari New York. Buku ini diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Fathul Umam, dalam "Surat menyurat Maryam Jamilah dan Abu A'la al-Maududi" diterbitkan Mizan, Bandung 1984

²⁴ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.....*, 158

10. Towards Understanding Islam, buku ini bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran kaum muda yang terdidik oleh pendidikan modern supaya memperoleh keyakinan yang murni tentang Islam. Buku ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Amirul Jamil, dalam “Menuju Pengertian Islam”, diterbitkan oleh Mizan, Bandung 1984
11. Al-Khilafah wal Mulk, buku ini menyajikan analisis dan evaluasi yang berani atas suatu kurun kelam dalam sejarah pemerintahan Islam, hanya beberapa dasawarsa sepeninggalan Rasul Saw. Bahkan merangkum spektrum yang sangat luas, mulai dari konsep Islam tentang pemerintahan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa Bani Umayyah dan Abbasiyah sampai kristalisasi aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah dan kodifikasi hukum Islam oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Yuauf. Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Muhammad al-Baqir, dalam “Khilafah dan Kerajaan”, yang diterbitkan oleh Mizan, Bandung 1984
12. Para Perintis Zaman Baru Islam. Sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Ilyas Hasan. Penerbit Mizan, Bandung 1996
13. Hak Azasi Manusia dalam Islam. Sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Harun Nasution. Diterbitkan untuk Yayasan Obor Indonesia Pustaka Firdaus, Jakarta 1987

PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI

Dengan pembagian manusia kepada beberapa tingkatan ini, jelas bahwa kemenangan yang sebenarnya bagi manusia tergantung pada iman, kuat atau lemahnya iman seseorang. Dimana tidak ada Iman maka tidak ada pula Islam.²

² Fauzi Rahman, *Upaya al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1993) 34-35

⁵ Abu A'la al-Maududi, *"Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim"* Terj. Oesman Raliby, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967) 38

1. Dasar-dasar Pemerintahan Dalam Islam

Ajaran-ajaran al-Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam praktek amaliyahnya. Beliau telah memilih masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang lahir dengan munculnya Islam. Kemudian meraih kekuasaan politis setelah peristiwa hijrah ke Madinah sebagai bentuk negaranya yang bertumpu atas dasar ajarannya.⁶

Dasar pemerintahan Islam ini setidaknya mempunyai empat sumber , yang *pertama* al-Qur'an, dimana al-Qur'an adalah merupakan sumber pertama dan paling utama. Yang berisi tentang pedoman dan perintah melingkupi semua sisi keberadaan manusia, entah itu prinsip dan semua aspek kehidupan sosial dan budaya manusia. *Kedua* al-Sunnah, yang menunjukkan bagaimana cara Rasulullah SAW menjabarkan ideologi Islam berdasarkan pedoman al-Qur'an kedalam bentuk praktisnya, kemudian mengembangkannya menjadi suatu tatanan sosial positif, sehingga pada akhirnya mengangkatnya menjadi suatu negara Islam yang tangguh,⁷ tanpa Sunnah untuk menjelaskan al-Qur'an, maka al-Qur'an laksana kitab yang tertutup, yang tidak mempunyai informasi yang diperlukan untuk memahaminya. Sementara al-Qur'an memberikan prinsip umum, sedangkan yang detail dan praktis dapat dijumpai hanya dalam Sunnah. Contohnya, bentuk dan frekuensi shalat, aturan puasa

⁶ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*. Terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung : Mizan, 1996) 93

⁷ Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1995) 227

2. Politik

Tauhid berarti Tuhan Yang Maha Esa, hanya Tuhan sajalah sang pencipta, pemelihara dan penguasa dari seluruh alam, baik organis atau

⁹ Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, 227-228

inorganis. Hanya Tuhanlah yang berhak memberi perintah atau melarang pengabdian atau ketaatan. Oleh karena itu bukanlah kita untuk menentukan maksud dan tujuan dari wujud kita ini, atau untuk menetapkan batas-batas dalam kekuasaan duniawiyah kita. Bagaimanapun juga tidak seorangpun mempunyai hak untuk mengambil keputusan-keputusan buat kita.

Prinsip kemaha Esaan Tuhan ini seluruhnya membatalkan konsepsi tentang kedaulatan hukum dan politik dari manusia, baik secara individual maupun kolektif. Tidak ada satupun yang dapat mengklaim sebagai yang mempunyai kedaulatan, hanya Allah sajalah yang berdaulat dan segala perintah-Nya adalah undang-undang dalam Islam, yaitu hukum Islam itu sendiri.

Perantara kita menerima hukum Tuhan dinamakan Risalah (kerasulan). Kita telah menerima dua benda yang tidak ternilai harganya, dari perantara tersebut yang merupakan sumber inti adalah al-Qur'an. Yang dengannya Allah telah memaparkan hukum dan hadits. Dan dengannya pula kita memperoleh penafsiran dan pola yang sah dari al-Qur'an itu oleh Rasulullah Muhammad SAW. lewat perkataan dan perbuatannya.¹⁰ Dengan demikian bahwa kerasulan merupakan sumber pemahaman akan hukum Allah. Itulah sebabnya kepatuhan pada Allah dan kepercayaan pada Rasul dijadikan garis antara keimanan dan kekufuran.¹¹

¹⁰ Maududi, *"Pokok-pokok Pandangan.....*, 38

¹¹ Rahman, *Upaya al-Maududi.....*, 36

Ambillah sekarang, sebagai misal tentang keadaan sebuah perusahaan milik anda, dan anda telah mengangkat orang lain untuk mengurusnya atas nama anda. Anda pantau akan melihat syarat akan harus dipenuhi tanpa perubahan. *Pertama*, pemilik sebenarnya pada perusahaan itu tetap ada pada anda dan bukan pada orang yang mengurus tersebut. *Kedua*, ia akan mengurus milik anda itu sesuai dengan instruksi-instruksi anda. *Ketiga*, ia akan melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas yang anda telah tetapkan. Dan *keempat*, dalam menjalankan administrasi dari amanat anda itu, ia akan melaksanakan sesuai dengan kehendak anda dan memenuhi keinginan-keinginan anda, dan bukan kehendak keinginan orang tersebut.

Keempat syarat ini adalah begitu interent dalam setiap konsep tentang perwakilan, sehingga semua itu harus terbayang dan muncul dalam pikiran begitu seseorang mengucapkan perkataan tersebut. Jika seorang wakil tidak memenuhi keempat syarat tersebut, ia jelas akan ditegur karena telah melanggar batas-batas dari kedudukannya sebagai wakil dan telah ingkar janji yang terkandung dalam konsep perwakilan itu. Inilah yang sebenarnya yang dimaksud oleh Islam ketika Allah menetapkan bahwa manusia adalah sebagai Khalifah dimuka bumi ini. Teori ini pada hakikatnya akan menjadi suatu perwakilan manusia dibawah kedaulatan Allah dan harus memenuhi tujuan

¹³ RM. Burrell, *Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995) 79

Abu A'la al-Maududi sangat menghargai iptek Barat, namun Abu A'la al-Maududi sangat selektif. Satu catatan yang selalu ditekankannya adalah, kalau keselamatan dan kebahagiaan tidak didapatkan oleh umat Islam dengan membudidayakan perikehidupan Barat, maka secepatnya kembali kepada Islam.¹⁴

Negara harus bekerja untuk dua tujuan. Yang *pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan.¹⁵ Tujuan negara Islam yang dapat dirumuskan atas dasar al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Allah. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

¹⁴ Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan modern Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998) 180-181

¹⁵ Maududi, *Khilafah*....., 75

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab Suci agar manusia dapat menciptakan keadilan. Dan Kami telah menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan manfaat yang banyak bagi manusia...”

(QS. 57:25)

Dalam ayat ini, besi melambangkan kekuatan politik, dan ayat ini juga menjelaskan bahwa tugas para Nabi adalah menciptakan suasana kehidupan, dimana rakyat memperoleh jaminan atas keadilan sosial yang sejalan dengan tolak ukur yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Kitab Suci-Nya, yang antara lain berisi aturan-aturan untuk membentuk suatu kehidupan yang disiplin.¹⁶

Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang dimiliki oleh pemerintah, yakni sistem yang membentuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang *ma'ruf*, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, dan agar negara memotong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah.¹⁷

Hal ini berarti bahwa tujuan utama suatu negara Islam untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaan

¹⁶ Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) 471-472

¹⁷ Maududi, *Khilafah.....*, 76

Kewajiban pertama atas seorang penguasa dalam negara Islam adalah menegakkan sistem kehidupan Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau menggantinya. Dan wajib memerintahkan yang ma'ruf, menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan ukuran dan nilai-nilai akhlak Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an;

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ لَاقَوْا الْعِثْلَةَ وَاتُّبِتِ الْزَكَاةَ وَمَعُورًا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

¹⁸ Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, 255

¹⁹ Maududi, *Khilafah*....., 104

B. Pemikiran Abu A'la al-Maududi Tentang Teori Politik Islam

Prinsip pertama dalam teori politik Islam adalah iman terhadap Ke-Esaan dan kekuasaan Allah merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam mengambil titik pijak. Prinsip dasar Islam adalah bahwa makhluk manusia, baik secara individual maupun kelompok harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan legislasi serta penguasaan atas sesamanya. Tidak seorangpun yang akan diperkenankan memberikan perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri, dan tidak seorangpun yang diperkenankan untuk mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah atau aturan seperti ini. Tidak seorangpun yang diberi hak istimewa untuk membuat undang-undang sekehendak hatinya sendiri dan tidak seorangpun yang wajib mengikatkan dirinya kepada undang-undang yang telah dibentuk dengan cara seperti itu, hak ini hanya merupakan hak Allah.²¹

²¹ Maududi, *Hukum dan Konstitusi*....., 156-157

2. Dasar-dasar Teori Politik Islam

²² Harun Nasution, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987) 171

Dalam pemikiran politik Islam, paling tidak terdapat tiga paradigma tentang hubungannya dengan negara. Nuansa diantara ketiga paradigma ini terletak pada konseptualisasi yang diberikan kepada kedua istilah tersebut. Islam dipahami sebagai agama yang memiliki totalitas, dalam pengertian meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Namun sumber Islam juga mengajukan pasangan istilah seperti; dunia-akhirat, agama-negara. Pasangan istilah ini menunjukkan adanya perbedaan konseptual dan mengesankan adanya dikotomi.

²³ Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, 145-146

Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah. Pemikiran politik Syi'ah memandang bahwa negara adalah kepemimpinan keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Berbeda dengan paradigma pemikiran politik Sunni yang menekankan pemufakatan dan pembaitan kepada kepala negara. Sedangkan paradigma Syi'ah menekankan kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan. Negara menurut Syi'ah adalah negara yang bersifat teokrasi. Negara teokrasi mengandung unsur pengertian, kekuasaan mutlak berada ditangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syari'at). Sifat teokrasi negara dalam pandangan Syi'ah dapat ditemukan dalam pemikiran banyak politik Syi'ah. Khomeini misalnya mengatakan, dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan.

Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat keturunan Nabi Muhammad. Berbeda dengan paradigma pemikiran politik Sunni yang

menekankan pemufakatan dan pembai'atan kepada negara. Sedangkan Syi'ah menekankan kepada kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan. Syi'ah memandang negara sebagai negara teokrasi yang mengandung unsur pengertian kekuasaan mutlak berada ditangan Tuhan. Seperti halnya tokoh Syi'ah Khomeini.

Negara Islam yang berdasarkan Syari'at itu dalam pandangan Abu A'la al-Maududi harus didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan dan menerapkan musyawarah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedaulatan yang sesungguhnya berada pada Tuhan. Negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan. Dalam perspektif demikian, konsep negara Islam menentang yang bersifat teokrasi, terutama yang menyangkut konstitusi negara yang harus berdasarkan syari'at. Akan tetapi Abu A'la al-Maududi sendiri menolak istilah tersebut dan lebih memilih istilah teodemokrasi. Bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, tetapi kedaulatan tersebut tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan.

Paradigma *kedua* memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat

Abu A'la al-Maududi secara sangat elementer dapat melengkapi gagasan-gagasannya yang telah dituangkan. Terutama mengingatkan kita, kaum Muslimin, bahwa kejatuhan politik umat Islam dimulai sejak ditinggalkannya sistem Khilafah dan dipakainya sistem *Mulk* atau sistem kerajaan. Barang kali Abu A'la al-Maududi adalah pemikir Islam yang sangat tajam dalam mengemukakan analisis sebab-sebab kejatuhan politik umat Islam dimuka bumi ini sambil menunjukkan cara-cara merebut kembali

²⁷ Ibid, 29-30

hak Allah. Sebagaimana Allah berfirman:

Artinya; kewenangan hanyalah milik Allah. Ia memerintahkan agar kamu hanya menyembah kepada-Nya, itulah agama yang benar. (QS 12:40)

Diayat lain Allah juga berfirman:

وَعَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . المائدة ٥٠-٥٤

²⁸ Maududi, *Khilafah.....*, 12-14

²⁹ Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, 156-157

yang bersumber tauhid selalu menentang penindasan, tirani dan pelestaria *vested interests* yang tidak adil.

Ajaran tauhid itu sendiri sangat sederhana, yaitu: “Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah”. Seandainya deklarasi “Tidak ada Tuhan selain Allah” berarti bahwa seorang manusia meng-Esakan Allah dan menyembah-Nya ditempat-tempat ibadah dan kemudian manusia itu mempunyai kebebasan penuh untuk berbuat apa saja diluar tempat ibadah dan menghamba pada kekuasaan selain Allah, maka alangkah bodohnya para penguasa diberbagai negara harus mengerahkan kekuatan dan siasatnya untuk menentang tauhid. Memang dalam kenyataan ada pertentangan besar antara para Rasul pembawa tauhid dengan lawan-lawan mereka³⁰

Misi seorang Nabi adalah untuk mengajarkan Islam, menenamkan ajaran-ajaran Allah dan menegakkan tuntunan Ilahi di dunia. Hal ini merupakan misi semua Nabi yang telah diturunkan Allah ganti berganti semenjak manusia pertama turun ke bumi sampai turunnya Nabi Muhammad SAW. adalah Nabi penutup diantara rangkaian nabi tersebut. Dengannyalah lembaga kenabian ditutup dan kepadanya diwahyukan aturan akhir untuk tuntunan umat manusia secara lengkap dan utuh. Semua nabi menyampaikan kepada umatnya tuntunan yang telah diwahyukan kepadanya dan menghimbau mereka untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta untuk berserah

³⁰ Maududi, *Khilafah*....., 13

Masalah pokok yang menjadi pertentangan besar antara para Nabi dan Rasul dengan lawan-lawan mereka bukanlah terletak pada pengingkaran musuh-musuh Nabi dan Rasul itu terhadap wujud atau eksistensi Tuhan, karena kebanyakan manusia, termasuk para musuh Rasul-rasul Tuhan juga mengakui eksistensi Tuhan. Bahkan mereka percaya bahwa Tuhan sajalah yang telah menciptakan seluruh jagad raya dan segenap isinya, bahwa mekanisme alam dan hukum-hukumnya juga tunduk kepada kehendak Tuhan dan bahwa Tuhan sajalah yang berkuasa menurunkan hujan, mengirimkan angin dan menguasai matahari, bumi dan bulan dan sebagainya. Akan tetapi mereka tidak mengakui bahwa Tuhan Allah adalah *Rabb* dan *Ilah*.

³¹ Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, 146

Sedangkan *Rabb* dalam bahasa Arab berarti Tuhan yang memelihara, mengatur, mengasihi dan menyempurnakan. Oleh karena itu hubungan antara manusia dengan *Rabb*-nya harus ditandai dengan kepasrahan, ketaatan dan ketundukan. Berhubung hanya Allah sajalah yang benar-benar *Ilah* dan *Rabb*, maka Dia sajalah yang berhak mengklaim ketaatan dan kepasrahan manusia. Disinilah letak persoalan yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa ketaatan, kepasrahan, ketundukan dan kesetiaan manusia (*the allegiance of man*) hanyalah untuk Allah belaka dan untuk peraturan-peraturan yang berasal dari-Nya.³²

³² Maududi, *Khilafah.....*, 14-15

³³ Maududi, *Hukum dan Konstitusi*....., 146-147

Abu A'la al-Maududi mengingatkan bahwa di zaman modern sekarang fenomena Fir'aun dan Namrud masih tetap kita amati secara jelas. Banyak sekali penguasa negara yang bertingkah laku dan bersikap bagaikan Fir'aun dan Namrud, yang merasa paling benar sendiri dan menuntut ketaatan rakyat secara total tanpa *reserve*. Di zaman modern sekarang para penguasa tidak ada yang mengklaim dirinya sebagai tuhan, akan tetapi tuntutan-tuntutan mereka tidak ubahnya dengan tuntutan-tuntutan tuhan, yaitu kemutlakan kekuasaannya atas rakyat yang diperintah. Otoritas dan kekuasaannya pantang untuk dilirik, apalagi ditentang. Anehnya sejarah menunjukkan bahwa pada umumnya rakyat memang mudah ditundukkan dengan ancaman, intimidasi

Abu A'la al-Maududi mengingatkan bahwa di zaman modern sekarang fenomena Fir'aun dan Namrud masih tetap kita amati secara jelas. Banyak sekali penguasa negara yang bertingkah laku dan bersikap bagaikan Fir'aun dan Namrud, yang merasa paling benar sendiri dan menuntut ketaatan rakyat secara total tanpa *reserve*. Di zaman modern sekarang para penguasa tidak ada yang mengklaim dirinya sebagai tuhan, akan tetapi tuntutan-tuntutan mereka tidak ubahnya dengan tuntutan-tuntutan tuhan, yaitu kemutlakan kekuasaannya atas rakyat yang diperintah. Otoritas dan kekuasaannya pantang untuk dilirik, apalagi ditentang. Anehnya sejarah menunjukkan bahwa pada umumnya rakyat memang mudah ditundukkan dengan ancaman, intimidasi

dan bayangan-bayangan mengerikan akibat propaganda yang efektif dari para penguasa.³⁴

Dewasa ini, manusia modern terjerembab kedalam perbudakan manusia atas manusia dan penyembahan kepada “tuhan-tuhan kecil” yang berwujud manusia. Apakah ia seorang Rusia atau Amerika, Italia atau Yugoslavia, Inggris atau Cina, ia berada dibawah bayangan kekuasaan suatu partai, seorang pemimpin, atau seorang plutokrat sedemikian rupa sehingga pada hakikatnya kontrol manusia atas manusia, penyembahan manusia kepada manusia dan pengawasan manusia atas manusia tetap saja berlangsung tanpa mengalami perubahan yang berarti. Manusia modern memang sudah mencampakkan penyembahan kepada alam (*nature-worship*), tetapi ia menggantinya dengan penyembahan kepada sesama manusia (*man-worship*). Bahkan kita dapat menyaksikan sekarang ini suatu bangsa yang mendominasi bangsa lainnya, suatu kelas yang menindas kelas lainnya, atau suatu partai politik yang menguasai anggota-anggotanya dengan mutlak sehingga seakan-akan partai itulah yang menentukan nasib manusia. Atau dapat juga kita saksikan seorang diktator yang menggenggam seluruh kekuasaan dan pengaruh, karena itu ia merasa menjadi Tuhan kecil yang setiap kehendaknya harus berlaku tanpa ada kekuatan lain yang dapat menentangnya.

Beberepa prinsip teori politik Islam. Ditinjau dari segi kaca mata teori politik modern, teori politik Islam seperti yang dikembangkan oleh Abu A'la al-

³⁴ Maududi, *Khilafah.....*, 15-16

Tujuan negara Islam yang dikonsepsikan Abu A'la al-Maududi adalah, harus bekerja untuk dua tujuan. *Pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang dimiliki oleh pemerintah, yakni sistem yang membetuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang *ma'ruf*, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, dan agar negara memotong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah.⁷

Hal ini berarti bahwa tujuan utama suatu negara Islam untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaan Allah yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia, dengan membudidayakan praktek-praktek kebajikan yang diperintahkan Islam.⁸ Sedangkan prinsip pertama dalam teori politik Islam adalah iman terhadap Ke-Esaan dan kekuasaan Allah merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul.⁹

⁷ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*. Terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung : Mizan, 1996) 75-76

⁸ Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, 255

⁹ *Ibid.* 156

milik Tuhan. Sedangkan Rasul itu merupakan perwujudan fisik dari kedaulatan *de jure* Tuhan di bumi dan merupakan untuk tujuan ini.¹³

¹³ Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, 242

B. Saran

1. Konsep Negara Islam ketika diterapkan dalam ranah hukum di Indonesia. Hal ini belum sempat dibahas dalam skripsi ini
2. Teori Poliktik Islam Abu A'la al-Maududi ketika dikaji dalam kontek Islam masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Yogyakarta : Mizan, 1998.
- Al-Jabiri, Abid. *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2001.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Gerakan Kebangkitan Islam*, terj. Hamid LA. Basmalah. Bandung : Risalah, 1984.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung : Mizan, 1995.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Menjadi Muslim Sejati*, terj. Ahmad Baidowi. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, terj. Oesman Raliby. Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung : Mizan, 1996.
- Aminuddin, Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Raman*. Jakarta : UI-Press, 2000.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta : Paramadina, 1995.
- Brown, W. Daniel. *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Mdoern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim. Bandung : Mizan, 2000.

- Burrell, RM. *Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995
- Esposito, John L. *Dinamika Kebangunan Islam*, terj. Bakri Sregar. Jakarta : Rajawali, 1987.
- Husein, Machnun. *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Nasution, Harun. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.
- Rahman, Fauzi. *Upaya al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam*. Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1993.
- Rahnema, Ali. *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan. Bandung : Mizan, 1996.
- Salim, Agus. *Negara Ideal menurut konsepi Abu A'la al-Maududi*. Adab, 1999.
- Sani, Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : UI-Press, 1990.
- Surya. *Pemikiran Abu A'la al-Maududi tentang sistem pemerintahan Islam dan kriterianya*. Syari'ah, 1996.
- Sutini. *Konsep negara Islam menurut Abu A'la al-Maududi, konstitusi negara dalam perspektif hukum Islam; analisa terhadap pemikiran Abu A'la al-Maududi*. Adab, 1997.
- Zahra, Abu. *Politik Demi Tuhan*. Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.